

## Perempuan dan Lahan Gambut

### Catatan Jurnal Perempuan

Perempuan dan Lahan Gambut

### Artikel

Membumikan Ekofeminisme dalam Restorasi Gambut: Kebijakan, Aksi, dan Tantangan

*Myrna Asnawati Safitri*

Perempuan Bertarung dengan Api di Lahan Gambut: Pengalaman Perempuan Desa di Provinsi Kalimantan Tengah dan Riau

*Catharina Indirastuti*

Ketika Purun Menjauh: Pengalaman Perempuan di Kawasan Gambut Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan

*Enik Maslahah*

Tanaman Purun dan Realita Pahit Perjuangan Perempuan di Lahan Gambut

*Taqiuddin Ibnu Syihab, Yustina Ambarini Murdiningrum, Lukas Rumboko Wibowo*

Aksi Perempuan Fasilitator Desa dalam Revitalisasi Ekonomi Kelompok Perempuan di Desa Gambut: Studi Kasus 3 Desa di Kalimantan Tengah

*Nur Iman Subono, Andi Misbahul Pratiwi & Abby Gina Boangmanalu*

Diterbitkan oleh:

YAYASAN  
**YJP**  
JURNAL  
PEREMPUAN

Yayasan Jurnal Perempuan  
No. Akreditasi: 36/E/KPT/2019

# Gerakan 1000 Sahabat Jurnal Perempuan

Pemerhati Jurnal Perempuan yang baik,

Jurnal Perempuan (JP) pertama kali terbit dengan nomor 01 Agustus/September 1996 dengan harga jual Rp 9.200,-. Jurnal Perempuan hadir di publik Indonesia dan terus-menerus memberikan yang terbaik dalam penyajian artikel-artikel dan penelitian yang menarik tentang permasalahan perempuan di Indonesia.



Tahun 1996, Jurnal Perempuan hanya berolah kurang dari seratus eksemplar yang didistribusikan sebagian besar secara gratis untuk dunia akademisi di Jakarta. Kini, oplah Jurnal Perempuan berkisar 3000 eksemplar dan didistribusikan ke seluruh Indonesia ke berbagai kalangan mulai dari perguruan tinggi, asosiasi profesi, guru-guru sekolah, anggota DPR, pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat dan kalangan umum seperti karyawan dan ibu rumah tangga.

Kami selalu hadir memberikan pencerahan tentang nasib kaum perempuan dan kelompok minoritas lainnya melalui kajian gender dan feminisme. Selama perjalanan hingga tahun ini, kami menyadari betapa sangat berat yang dihadapi kaum perempuan dan betapa kami membutuhkan bantuan semua kalangan termasuk laki-laki untuk peduli pada perjuangan perempuan karena perjuangan ini.

Jurnal Perempuan menghimbau semua orang yang peduli pada Jurnal Perempuan untuk membantu kelangsungan penerbitan, penelitian dan advokasi Jurnal Perempuan. Tekad kami adalah untuk hadir seterusnya dalam menyajikan penelitian dan bacaan-bacaan yang bermanfaat untuk masyarakat Indonesia dan bahkan suatu saat dapat merambah pembaca internasional. Kami berharap anda mau membantu mewujudkan cita-cita kami.

Bila anda percaya pada investasi bacaan bermutu tentang kesetaraan dan keadilan dan peduli pada keberadaan Jurnal Perempuan, maka, kami memohon kepada publik untuk mendukung kami secara finansial, sebab pada akhirnya Jurnal Perempuan memang milik publik. Kami bertekad menggalang 1000 penyumbang Jurnal Perempuan atau 1000 Sahabat Jurnal Perempuan. Bergabunglah bersama kami menjadi penyumbang sesuai kemampuan anda:

- SJP Mahasiswa S1 : Rp 150.000,-/tahun
- SJP Silver : Rp 300.000,-/tahun
- SJP Gold : Rp 500.000,-/tahun
- SJP Platinum : Rp 1.000.000,-/tahun
- SJP Company : Rp 10.000.000,-/tahun

Formulir dapat diunduh di <http://www.jurnalperempuan.org/sahabat-jp.html>

Anda akan mendapatkan terbitan-terbitan Jurnal Perempuan secara teratur, menerima informasi-informasi kegiatan Jurnal Perempuan dan berita tentang perempuan serta kesempatan menghadiri setiap event Jurnal Perempuan.

Dana dapat ditransfer langsung ke bank berikut data pengirim, dengan informasi sebagai berikut:

**- Bank Mandiri Cabang Jatipadang atas nama Yayasan Jurnal Perempuan Indonesia  
No. Rekening 127-00-2507969-8**

(Mohon bukti transfer diemail ke [ima@jurnalperempuan.com](mailto:ima@jurnalperempuan.com))

Semua hasil penerimaan dana akan dicantumkan di website kami di: [www.jurnalperempuan.org](http://www.jurnalperempuan.org)

Informasi mengenai donasi dapat menghubungi Himah Sholihah (Hp 081807124295,  
email: [ima@jurnalperempuan.com](mailto:ima@jurnalperempuan.com)).

Sebagai rasa tanggung jawab kami kepada publik, sumbangan anda akan kami umumkan pada tanggal 1 setiap bulannya di website kami [www.jurnalperempuan.org](http://www.jurnalperempuan.org) dan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Yayasan Jurnal Perempuan.

Salam pencerahan dan kesetaraan,

**Gadis Arivia**

(Pendiri Jurnal Perempuan)



ISSN 1410-153X

## PENDIRI

Dr. Gadis Arivia  
Prof. Dr. Toeti Heraty Noerhadi-Roosseno  
Ratna Syafrida Dhanny  
Asikin Arif (Alm.)

## DEWAN PEMBINA

Dr. Gadis Arivia  
Prof. Dr. Toeti Heraty Noerhadi-Roosseno  
Mari Elka Pangestu, Ph.D.  
Svida Alisjahbana

## DIREKTUR & PEMIMPIN REDAKSI

Dr. Atnike Nova Sigiro

## DEWAN REDAKSI

Prof. Dr. Sulistyowati Irianto (Antropologi Hukum Feminisme, Universitas Indonesia)  
Prof. Sylvia Tiwon (Antropologi Gender, University California at Berkeley)  
Prof. Saskia Wieringa (Sejarah Perempuan & Queer, Universiteit van Amsterdam)  
Prof. Dr. Musdah Mulia (Pemikiran Politik Islam & Gender, UIN Syarif Hidayatullah)  
Dr. Nur Iman Subono (Politik & Gender, FISIPOL Universitas Indonesia)  
Mariana Amiruddin, M.Hum (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan)  
Yacinta Kurniasih, M.A. (Sastra dan Perempuan, Faculty of Arts, Monash University)  
Soe Tjen Marching, Ph.D (Sejarah dan Politik Perempuan, SOAS University of London)  
Dr. Andi Achdian (Sejarah & Sosiologi, Universitas Nasional)

## MITRA BESTARI

Prof. Mayling Oey-Gardiner (Demografi & Gender, Universitas Indonesia)  
David Hulse, PhD (Politik & Gender, Former Regional Representative Ford Foundation Jakarta)  
Dr. Pinky Saptandari (Politik & Gender, Universitas Airlangga)  
Dr. Kristi Poerwandari (Psikologi & Gender, Universitas Indonesia)  
Dr. Ida Ruwaida Noor (Sosiologi Gender, Universitas Indonesia)  
Katharine McGregor, PhD. (Sejarah Perempuan, University of Melbourne)  
Dr. (iur) Asmin Fransiska, SH, LLM (Hukum & Hak Asasi Manusia, Universitas Katolik Atma Jaya, Jakarta)  
Dr. Irene Hadiprayitno (Hak Asasi Manusia & Hubungan Internasional, Leiden University)  
Prof. Jeffrey Winters (Politik & Gender, Northwestern University)  
Ro'fah, PhD. (Agama & Gender, UIN Sunan Kalijaga)  
Tracy Wright Webster, PhD. (Gender & Cultural Studies, University of Western Australia)  
Prof. Kim Eun Shil (Antropologi & Gender, Korean Ewha Womens University)  
Prof. Merlyna Lim (Media, Teknologi & Gender, Carleton University)  
Prof. Claudia Derichs (Politik & Gender, Universitaet Marburg)

Sari Andajani, PhD. (Antropologi Medis, Kesehatan Masyarakat & Gender, Auckland University of Technology)  
Dr. Wening Udasmoro (Budaya, Bahasa & Gender, Universitas Gajah Mada)  
Prof. Ayami Nakatani (Antropologi & Gender, Okayama University)  
Dr. Antarini Pratiwi Arna (Hukum & Gender, Indonesian Scholarship and Research Support Foundation)  
Dr. Widjajanti M Santoso (Gender, Sosiologi & Media, Indonesian Institute of Sciences)  
Dr. Lidwina Inge Nurtjahyo (Hukum & Gender, Universitas Indonesia)  
Dr. Bagus Takwin (Psikologi & Gender, Universitas Indonesia)  
Ikhaputri Widiyanti, M. Si. (Filsafat dan Feminisme, Universitas Indonesia)  
Elisabet Kuswijayanti M.Si. (Ekologi dan Gender)  
Francisca Saveria Sika Ery Seda, Ph.D. (Sosiologi, Gender & Kemiskinan, Universitas Indonesia)  
Ruth Indiah Rahayu, M. Fil. (Sejarah, Gender & Filsafat, Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara)  
Prof. Maria Lichtmann (Teologi Kristen and Feminisme, Appalachian State University, USA)  
Assoc. Prof. Muhamad Ali (Agama & Gender, University California, Riverside)  
Assoc. Prof. Mun'im Sirry (Teologi Islam & Gender, University of Notre Dame)  
Assoc. Prof. Paul Bijl (Sejarah, Budaya & Gender, Universiteit van Amsterdam)  
Assoc. Prof. Patrick Ziegenhain (Politik & Gender, Goethe University Frankfurt)  
Assoc. Prof. Alexander Horstmann (Studi Asia & Gender, University of Copenhagen)

## REDAKSI PELAKSANA

Andi Misbahul Pratiwi

## SEKRETARIS REDAKSI

Abby Gina Boangmanalu

## REDAKSI

Dewi Komalasari

## SEKRETARIAT DAN SAHABAT JURNAL PEREMPUAN

Himah Sholihah  
Andri Wibowo

## DESAIN & TATA LETAK

Dina Yulianti

## ALAMAT REDAKSI:

Jl. Karang Pola Dalam II No. 9A, Jati Padang  
Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12540  
Telp./Fax (021) 2270 1689  
E-mail: [yjp@jurnalperempuan.com](mailto:yjp@jurnalperempuan.com)  
[redaksi@jurnalperempuan.com](mailto:redaksi@jurnalperempuan.com)

## WEBSITE:

[www.jurnalperempuan.org](http://www.jurnalperempuan.org)  
[indonesianfeministjournal.org](http://indonesianfeministjournal.org)

Cetakan Pertama, Februari 2020

## Daftar Isi

### Catatan Jurnal Perempuan

Perempuan dan Lahan Gambut/ *Women and Peatlands* ..... iii

### Artikel

- Membumikan Ekofeminisme dalam Restorasi Gambut: Kebijakan, Aksi, dan Tantangan/ *Manifesting Ecofeminism in Peatland Restoration: Policies, Actions, and Challenges* ..... 1-12  
*Myrna Asnawati Safitri*
- Perempuan Bertarung dengan Api di Lahan Gambut: Pengalaman Perempuan Desa di Provinsi Kalimantan Tengah dan Riau/ *Women Fighting Peatland Fire: Rural Women's Experiences in Central Kalimantan and Riau Provinces* ..... 13-24  
*Catharina Indirastuti*
- Ketika Purun Menjauh: Pengalaman Perempuan di Kawasan Gambut Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan/ *Being Away from Purun: Women's Experiences in Peatland Area of Hulu Sungai Utara, South Kalimantan* ..... 25-35  
*Enik Maslahah*
- Tanaman Purun dan Realita Pahit Perjuangan Perempuan di Lahan Gambut/ *Purun and The Bitter Realities of Women's Struggle in Peatland Areas* ..... 37-45  
*Taqiyuddin Ibnu Syihab, Yustina Ambarini Murdiningrum, Lukas Rumboko Wibowo*
- Aksi Perempuan Fasilitator Desa dalam Revitalisasi Ekonomi Kelompok Perempuan di Desa Gambut: Studi Kasus 3 Desa di Kalimantan Tengah/ *Women Village Facilitator Action on Economic Revitalization of the Women's Group: A Case Study in 3 peatland villages, Central Kalimantan* ..... 47-61  
*Nur Iman Subono, Andi Misbahul Pratiwi & Abby Gina Boangmanalu*

# Perempuan dan Lahan Gambut

## *Women and Peatlands*

Indonesia memiliki lahan gambut dengan luas mencapai 22,5 juta hektar. Ia menyumbang 47% luas lahan gambut di wilayah tropis dan merupakan negara dengan lahan gambut terluas di Asia Tenggara. Oleh sebab itu keberadaan lahan gambut di Indonesia memiliki arti penting bagi kelestarian lingkungan secara global. Sayangnya, wacana seputar lahan gambut masih muncul terbatas pada situasi tertentu seperti saat terjadinya kebakaran hutan dan lahan (*karhutla*). Wacana lahan gambut yang muncul pun umumnya berfokus pada persoalan ekologi dan ekonomi, padahal keberadaan lahan gambut memiliki dimensi luas, baik dari segi sosial, budaya, politik, bahkan dalam dimensi keadilan gender. Dengan luasnya kawasan lahan gambut di Indonesia, maka jelas bahwa lahan gambut memiliki arti penting bagi kehidupan masyarakat, khususnya penduduk yang hidup di sekitar kawasan lahan gambut, termasuk di dalamnya kaum perempuan.

Persoalan lahan gambut sebagai persoalan lingkungan secara global telah cukup lama dibahas, setidaknya sejak diadopsinya *the Ramsar Convention on Wetlands of International Importance especially as Waterfowl Habitat* (Konvensi Ramsar) di kota Ramsar, Iran, pada tahun 1971. Konvensi Ramsar telah menekankan pentingnya pencegahan kerusakan, pencegahan hilangnya lahan basah, serta pentingnya pelestarian lahan basah sebagai bagian dari pembangunan yang berkelanjutan. Indonesia sendiri telah meratifikasi Konvensi Ramsar pada tahun 1991. International Union for Conservation of Nature (IUCN) menyebutkan lahan gambut sebagai ekosistem bumi yang sangat berharga karena fungsinya dalam pelestarian keragaman hayati, sebagai sumber air, pencegahan banjir, dan untuk mengatasi perubahan iklim.

Ekofeminisme secara umum melihat akar dari kerusakan terhadap alam dan penindasan terhadap perempuan sebagai akibat dari dominasi patriarki. Sebagaimana pandangan Karen J. Warren, cara pandang patriarki yang hierarkis dan opresif telah menindas alam dan perempuan. Kerusakan kawasan lahan gambut di Indonesia telah terjadi sejak zaman Orde Baru seperti salah satunya adalah *Rice Mega Project* yang mengubah lahan gambut di Kalimantan menjadi lahan persawahan. Pembangunan yang agresif dan juga bencana seperti kebakaran lahan dan hutan yang telah berjalan selama puluhan tahun tersebut telah berakumulasi dan menjadi warisan persoalan kawasan lahan gambut di Indonesia yang kita hadapi hingga hari ini.

Karhutla besar yang terjadi di Indonesia pada medio 2015 merupakan peringatan dan penanda penting atas ancaman terhadap kawasan lahan gambut di Indonesia. Hal ini ditandai dengan pembentukan Badan Restorasi Gambut (BRG) oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2016. BRG merupakan sebuah lembaga non-struktural di bawah Presiden yang diberi mandat untuk mengkoordinasikan dan memfasilitasi kawasan lahan gambut di tujuh provinsi, yaitu: Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Riau, Sumatera Selatan, dan Papua. Konsep restorasi lahan gambut yang dijalankan oleh BRG mengakui bahwa pemulihan tanah tidak dapat dilakukan hanya dalam dimensi ekologis-geologis, tetapi juga dalam dimensi pemulihan masyarakat sebagai bagian dari ekosistem lahan gambut. Konsekuensinya maka kaum perempuan juga harus menjadi penerima manfaat dan sekaligus agen dalam proses restorasi tersebut.

Perempuan memiliki kepentingan yang besar akan kelestarian lingkungan. Maria Mies dan Vandana Shiva, pemikir dan aktivis ekofeminisme, berargumen bahwa perempuan memiliki kepentingan yang besar terhadap kelestarian lingkungan. Hal

ini disebabkan oleh peran gender yang dibebankan kepada perempuan dalam pengasuhan dan pengelolaan kehidupan sehari-hari. Sehingga, agar dapat memberikan nutrisi yang cukup bagi anak dan/atau keluarga, memperoleh air yang bersih, dan berbagai kebutuhan sehari-hari lainnya, maka perempuan memiliki kepentingan akan ketersediaan dan kelestarian sumber daya alam seperti air, udara, lahan, serta flora dan fauna.

Kaum perempuan yang hidup di kawasan lahan gambut merupakan gambaran yang jernih tentang hubungan antara kerusakan lingkungan dan akibatnya terhadap perempuan. Salah satu budaya dan ekonomi lokal di kawasan lahan gambut di Kalimantan adalah anyaman purun (purun adalah sejenis rumput yang tumbuh di lahan gambut dan sering digunakan sebagai bahan anyaman). Keterampilan menganyam purun umumnya dilakukan oleh perempuan, dan dilakukan di sela-sela waktu peran pengasuhan di dalam rumah tangga atau keluarga. Rusaknya lahan gambut menyebabkan hilangnya purun yang tumbuh bebas di sekitar desa. Ketika *purun* tidak lagi tumbuh di sekitar desa, maka perempuan pengrajin purun harus mencari purun jauh keluar desa, atau harus mengeluarkan biaya ekstra untuk membeli purun untuk bahan baku pembuatan anyaman.

Bencana karhutla di kawasan lahan gambut telah menyebabkan kerugian ekonomi dan trauma terhadap penduduk. Perempuan adalah kelompok yang merasakan dampak langsung karhutla dalam kehidupan sehari-hari, seperti keringnya sumber air, rusaknya kebun, dan hilangnya sumber daya hayati lokal seperti ikan. Namun demikian, program-program pencegahan karhutla masih cenderung mengabaikan perempuan. Padahal ketika kebakaran terjadi, perempuan juga turut memadamkan api baik di lahan perkebunan maupun di pemukiman. Perempuan juga harus memikirkan dampak lanjutan dari karhutla terhadap kehidupan keluarga. Misalnya, kaum perempuan harus mencari cara mencegah asap masuk ke dalam rumah, atau merawat anggota keluarga yang sakit akibat asap ketika terjadi karhutla.

Pengalaman kerusakan lahan gambut dan akibatnya terhadap masyarakat dan perempuan menguatkan argumen ekofeminis seperti Ynestra King. King berpandangan bahwa kerusakan dan/atau penindasan yang terjadi terhadap manusia berakar dari relasi yang hierarkis dan timpang. Sebagaimana relasi kuasa yang timpang antara laki-laki terhadap perempuan, akibat yang kita rasakan dari rusaknya kawasan lahan gambut, karhutla, bencana asap, dan lainnya, juga menggambarkan relasi kuasa dalam pengelolaan dan pemanfaatan lahan gambut selama ini.

Namun, ekofeminisme tidak berhenti pada argumen akan keterkaitan antara eksploitasi terhadap alam dengan dominasi terhadap perempuan. Ekofeminisme juga melihat agensi perempuan dalam memulihkan dan menjaga kelestarian lingkungan. Pengalaman perempuan fasilitator desa di Desa Peduli Gambut memperlihatkan keberdayaan diri yang politis perempuan untuk mencari jalan keluar dalam menghadapi tantangan struktural dan kultural dalam proses restorasi gambut. Ekofeminisme menawarkan perubahan dalam cara pandang manusia yang superior terhadap alam melalui kacamata keadilan gender. Ajakan yang sama diajukan melalui pengetahuan yang dihadirkan dari pengalaman kaum perempuan, serta upaya mereka untuk memulihkan dan memelihara lahan gambut, di dalam edisi Jurnal Perempuan kali ini. Selamat membaca!

(Atnike Nova Sigi)



---

Myrna Asnawati Safitri (Badan Restorasi Gambut dan Universitas Pancasila, DKI Jakarta, Indonesia)

**Membumikan Ekofeminisme dalam Restorasi Gambut: Kebijakan, Aksi, dan Tantangan**

*Manifesting Ecofeminism in Peatland Restoration: Policies, Actions, and Challenges*

Kode Naskah: DDC 305  
Jurnal Perempuan, Vol. 25 No. 1, Februari 2020, hal. 1-12, 24 daftar pustaka

Degradation of peatland ecosystems occurs as a result of excessive exploitation leading to peat drainage and fires. This was influenced by a masculinity perspective in resource tenure and utilization. Ecofeminism presents a different perspective on narratives and inter-relationships of human with nature, including the place of women in them. Injustice that befalls women occur due to unequal power relations in the control and utilization of resources in the peatland ecosystem. This paper discusses the Government of Indonesia's efforts to reduce gender injustice through Peatland Restoration's policy. Two policies are discussed here, namely the Social Safety Safeguard and Peat Cares Village Program. It is concluded that women's participation must be able to resolve the imbalance of power relations among women as well as between gender. This requires sufficient time and everlasting education.

Keywords: ecofeminism, power relation, peatland, peatland restoration.

Kerusakan ekosistem gambut terjadi akibat eksploitasi berlebihan sehingga menyebabkan kekeringan dan kebakaran. Hal ini dipengaruhi pandangan maskulinitas pada penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam. Ekofeminisme hadir memberi cara pandang lain terhadap narasi dan relasi manusia dengan alam, termasuk tempat perempuan di dalamnya. Ketidakadilan yang menimpa perempuan terjadi karena relasi kuasa yang tidak berimbang dalam penguasaan dan pemanfaatan sumber daya di ekosistem gambut. Tulisan ini mendiskusikan upaya Pemerintah Indonesia untuk mengurangi ketidakadilan gender melalui kebijakan Restorasi Gambut. Terdapat dua kebijakan yang dibahas yaitu Kerangka Pengaman Sosial dan Program Desa Peduli Gambut. Disimpulkan bahwa partisipasi perempuan sejatinya juga harus mampu menyelesaikan ketidakseimbangan relasi kuasa antar perempuan selain antar gender. Untuk ini diperlukan waktu yang cukup serta edukasi yang terus-menerus.

Kata kunci: ekofeminisme, relasi kuasa, gambut, restorasi gambut.

---

Catharina Indirastuti (Kemitraan-Partnership for Governance Reform, Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan)

**Perempuan Bertarung dengan Api di Lahan Gambut: Pengalaman Perempuan Desa di Provinsi Kalimantan Tengah dan Riau**

*Women Fighting Peatland Fire: Rural Women's Experiences in Central Kalimantan and Riau Provinces*

Kode Naskah: DDC 305  
Jurnal Perempuan, Vol. 25 No. 1, Februari 2020, hal. 13-24, 1 grafik, 9 daftar pustaka

Forest and land fire that repeatedly destroyed million hectares of peatland in Indonesia is a result of unsustainable peatland governance for many years. Rural women and men living in peatland have different experiences with forest and land fire. Intersectionality between gender

and class, geographical location, and ethnicity further add nuances to these different experiences. This article explores women experiences in fighting peat forest and land fire in 3 target villages of Peat Care Village Program led by Peat Restoration Agency in Central Kalimantan and Riau. Power network that women must endure and a priori on gendered roles and responsibilities weaken women's position in fighting peatland fire. Women do not have access to resources given to prevent and fight against forest and land fire, while in reality fire-fighting activities require women's involvement especially when it happened in their land or living space. Women experiences in facing peat forest and land fire is reflected using feminist political ecology approach to highlight the multiple impacts that women experience.

Keywords: forest and land fire, intersectionality, peatland villages, women's access.

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berulang kali membakar jutaan hektar lahan gambut di Indonesia merupakan akibat dari tata kuasa dan tata kelola lahan gambut yang tidak berkelanjutan selama puluhan tahun. Perempuan dan laki-laki di wilayah gambut perdesaan memiliki penghayatan yang berbeda mengenai karhutla. Interseksionalitas antara gender dengan kelas, lokasi geografis, dan suku turut mewarnai perbedaan pengalaman yang dirasakan. Artikel ini menelusuri pengalaman perempuan dalam penanggulangan karhutla di 3 desa dampingan Badan Restorasi Gambut dalam Program Desa Peduli Gambut di Provinsi Kalimantan Tengah dan Riau. Jaringan relasi kuasa yang melingkupi kehidupan perempuan dan *a priori* atas peran dan tanggung jawab yang digenderkan melemahkan posisi perempuan menghadapi karhutla. Perempuan tidak memiliki akses atas sumber daya untuk pencegahan dan penanggulangan karhutla, sementara aktivitas penanggulangan karhutla menuntut keterlibatan perempuan karena terjadi di ruang hidup perempuan. Pengalaman perempuan menghadapi karhutla direfleksikan dengan pendekatan ekologi politik feminis untuk melihat dampak berlapis yang dialami perempuan.

Kata kunci: kebakaran hutan dan lahan, interseksionalitas, desa gambut, akses perempuan.

---

Enik Maslahah (Badan Restorasi Gambut (BRG), Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan)

**Ketika Purun Menjauh: Pengalaman Perempuan di Kawasan Gambut Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan**

*Being Away from Purun: Women's Experiences in Peatland Area of Hulu Sungai Utara, South Kalimantan*

Kode Naskah: DDC 305  
Jurnal Perempuan, Vol. 25 No. 1, Februari 2020, hal. 25-35, 4 tabel, 10 daftar pustaka

Purun is a typical plant that grow in peatland area that has important functions for people living in peatland area. The availability of purun is now decreasing due to changes in land management and environmental destruction. Almost all of the plantation commodities in the peatlands area, management of peatlands in the forestry, agriculture, plantation and fisheries sectors apply exploitative and pragmatic methods, while ignoring environmental sustainability. Furthermore, environmental damage also occurs due to disasters such as forest and land fires that often occur in peatland areas in Indonesia. One of the damages happen to peatland area is the damage and scarcity of purun. As users and beneficiaries of purun, women become the affected group that face the impact of peatland destruction. This paper describes the experiences and efforts of women in peatland areas to restore land and restore the existence of purun in their villages.

Keywords: women and peatland, purun, peatland restoration.

Purun adalah salah satu tanaman khas yang hidup di kawasan lahan gambut yang memiliki fungsi bagi masyarakat di kawasan lahan gambut. Keberadaan purun saat ini mulai berkurang akibat perubahan tata kelola lahan dan kerusakan lingkungan. Sebagian besar komoditas perkebunan di kawasan lahan gambut, pengelolaan lahan gambut di sektor kehutanan, pertanian, perkebunan, dan perikanan dikelola dengan cara eksploitatif dan pragmatis, sementara kurang menghiraukan keberlanjutan lingkungan. Selain itu, kerusakan lingkungan juga terjadi akibat bencana seperti kebakaran hutan dan lahan yang masih sering terjadi di kawasan lahan gambut di Indonesia. Salah satu kerusakan yang terjadi terhadap kawasan lahan gambut adalah kerusakan dan kelangkaan tanaman purun. Sebagai pengelola dan pemanfaat purun, perempuan menjadi kelompok terdampak yang menghadapi dampak kerusakan lahan gambut. Tulisan ini memaparkan pengalaman dan upaya perempuan di kawasan lahan gambut untuk merestorasi lahan dan mengembalikan keberadaan purun di desa mereka.

Kata Kunci: perempuan dan lahan gambut, purun, restorasi gambut.

<sup>1</sup>Taqiyuddin Ibnu Syihab, <sup>2</sup>Yustina Ambarini Murdiningrum,  
<sup>3</sup>Lukas Rumboko Wibowo (<sup>1,2</sup>Epistema Institute, <sup>3</sup>P3SEKPI, DKI  
Jakarta, Indonesia)

### Tanaman Purun dan Realita Pahit Perjuangan Perempuan di Lahan Gambut

*Purun and The Bitter Realities of Women's Struggle in Peatland  
Areas*

Kode Naskah: DDC 305

Jurnal Perempuan, Vol. 25 No. 1, Februari 2020, hal. 37-45, 2 gambar, 21  
daftar pustaka

This paper aims to examine the elimination process of traditional conservation that has been built for many years by women on peatlands. This article reveals the struggle and multiple burdens of women in conservation, to do reproductive and productive work in the midst of clashing interests in peatland area. Research conducted shows that there is a shift in the mode of production from subsistence toward exploitative hegemony by capitalistic interests, as a product of modern scientific knowledge. Corporations compete for peatland areas to accumulate endless capital which then threatens the purun and the purun weaving community of women. This has not only led to degradation of the purun ecosystem but also the loss of source of life and cultural identity for the purun weaving community. From an ecofeminist perspective, investment policies and regimes with minimum controls have systematically destroyed peat ecosystems, resulting in economic powerlessness and impoverishment of women.

Keywords: purun, women and natural resources, women and peatlands

Tulisan ini mengkaji proses penyingkiran terhadap konservasi tradisional yang telah terbangun secara bertahun-tahun oleh kaum perempuan di lahan gambut. Artikel ini mengungkapkan pergolatan dan multi beban perempuan dalam konservasi, melakukan pekerjaan reproduktif dan produktif di tengah-tengah semakin derasnya perebutan dan klaim kepentingan atas lahan gambut. Penelitian yang dilakukan memperlihatkan adanya pergeseran mode produksi dari subsistensi menuju ke arah eksploitatif yang terhegemoni oleh kepentingan yang kapitalistis, sebagai produk dari ilmu pengetahuan modern. Korporasi memperebutkan lahan gambut untuk akumulasi kapital yang menjadi ancaman bagi purun dan komunitas perempuan penganyam purun. Akibatnya, komunitas penganyam purun tidak hanya kehilangan sumber kehidupan dan ekosistem purun tetapi juga identitas budaya mereka. Perspektif ekofeminis memandang bahwa

kebijakan dan rezim investasi dengan kontrol minimum secara sistematis telah menghancurkan ekosistem gambut, yang mengakibatkan ketidakberdayaan ekonomi dan pemiskinan perempuan.

Kata kunci: purun, perempuan dan sumberdaya alam, perempuan dan lahan gambut

<sup>1</sup>Nur Iman Subono, <sup>2</sup>Andi Misbahul Pratiwi, <sup>2</sup>Abby Gina  
(<sup>1</sup>Departemen Ilmu Politik, Universitas Indonesia & <sup>2</sup>Jurnal  
Perempuan, DKI Jakarta)

### Aksi Perempuan Fasilitator Desa dalam Revitalisasi Ekonomi Kelompok Perempuan di Desa Gambut: Studi Kasus 3 Desa di Kalimantan Tengah

*Women Village Facilitator Action on Economic Revitalization of  
the Women's Group: A Case Study in 3 peatland villages, Central  
Kalimantan*

Kode Naskah: DDC 305

Jurnal Perempuan, Vol. 25 No. 1, Februari 2020, hal. 47-61, 1 tabel, 2  
grafik, 17 daftar pustaka

Peatlands play an important role in the ecological and economic aspects. Peatlands degradation in various regions in Indonesia brings economic issues, especially for women. The involvement of women in the peatland restoration program as a strategy needs to be reviewed. This research focuses on the involvement of women in the peatland restoration as a village facilitator, mainly on aspects of economic revitalization. This research focuses in 3 Villages in Central Kalimantan Province, Jabiren Village, Tumbang Nusa Village, and Gandang Barat Village. The main question of this research is how are the actions, challenges, and strategies experienced by women as village facilitators in the Desa Peduli Gambut program. Based on in-depth interviews with relevant actors and literature studies, this research finds, 1) the economic revitalization program conducted by women village facilitators build the economic resilience of rural women communities and changes the gender relations; 2) women village facilitators faced structural and cultural obstacles in their action; 3) the program is also the part of political actions for peatlands preservation.

Keyword: women village facilitator, peatlands restoration, economic revitalization, power

Lahan gambut memainkan peran penting dalam aspek ekologi dan ekonomi. Degradasi lahan gambut di berbagai daerah di Indonesia membawa masalah ekonomi masyarakat, terutama bagi perempuan. Pelibatan perempuan dalam restorasi lahan gambut menjadi salah satu strategi yang patut ditinjau. Penelitian ini berfokus pada keterlibatan perempuan dalam restorasi lahan gambut sebagai fasilitator desa, terutama perannya pada revitalisasi ekonomi desa. Penelitian ini berfokus pada perempuan fasilitator desa di 3 desa di Provinsi Kalimantan Tengah yakni Desa Jabiren, Desa Tumbang Nusa, dan Desa Gandang Barat. Pertanyaan utama dari penelitian ini adalah bagaimana tindakan, tantangan, dan strategi yang dialami oleh perempuan sebagai fasilitator desa dalam program Desa Peduli Gambut. Berdasarkan wawancara mendalam dengan aktor-aktor dan studi literatur yang relevan, penelitian ini menemukan bahwa 1) program revitalisasi ekonomi yang dilakukan oleh perempuan fasdes membawa dampak terhadap ketahanan ekonomi perempuan pedesaan dan perubahan relasi gender di dalam keluarga; 2) perempuan fasilitator desa mengalami hambatan struktural dan kultural dalam aksinya; 3) program yang dikembangkan perempuan fasdes merupakan bagian dari aksi politik untuk pelestarian lahan gambut.

Kata kunci: perempuan fasilitator desa, restorasi lahan gambut, revitalisasi ekonomi, kekuasaan

## Ketika Purun Menjauh: Pengalaman Perempuan di Kawasan Gambut Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan

### *Being Away from Purun: Women's Experiences in Peatland Area of Hulu Sungai Utara, South Kalimantan*

**Enik Maslahah**

Dinamisator Program Desa Peduli Gambut Kalimantan Selatan, Badan Restorasi Gambut (BRG)  
Komplek BTN Jl. Nelayan No 48, Kota Raja, Amuntai Selatan, Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan

maslahah10@gmail.com

Kronologi Naskah: diterima 27 Februari 2020, direvisi 26 Maret 2020, diputuskan diterima 15 April 2020

#### Abstract

Purun is a typical plant that grow in peatland area that has important functions for people living in peatland area. The availability of purun is now decreasing due to changes in land management and environmental destruction. Almost all of the plantation commodities in the peatlands area, management of peatlands in the forestry, agriculture, plantation and fisheries sectors apply exploitative and pragmatic methods, while ignoring environmental sustainability. Furthermore, environmental damage also occurs due to disasters such as forest and land fires that often occur in peatland areas in Indonesia. One of the damages happen to peatland area is the damage and scarcity of purun. As users and beneficiaries of purun, women become the affected group that face the impact of peatland destruction. This paper describes the experiences and efforts of women in peatland areas to restore land and restore the existence of purun in their villages.

Keywords: women, peatland, purun, peatland restoration

#### Abstrak

Purun adalah salah satu tanaman khas yang hidup di kawasan lahan gambut yang memiliki fungsi bagi masyarakat di kawasan lahan gambut. Keberadaan purun saat ini mulai berkurang akibat perubahan tata kelola lahan dan kerusakan lingkungan. Sebagian besar komoditas perkebunan di kawasan lahan gambut, pengelolaan lahan gambut di sektor kehutanan, pertanian, perkebunan, dan perikanan dikelola dengan cara eksploitatif dan pragmatis, sementara kurang menghiraukan keberlanjutan lingkungan. Selain itu, kerusakan lingkungan juga terjadi akibat bencana seperti kebakaran hutan dan lahan yang masih sering terjadi di kawasan lahan gambut di Indonesia. Salah satu kerusakan yang terjadi terhadap kawasan lahan gambut adalah kerusakan dan kelangkaan tanaman purun. Sebagai pengelola dan pemanfaat purun, perempuan menjadi kelompok terdampak yang menghadapi dampak kerusakan lahan gambut. Tulisan ini memaparkan pengalaman dan upaya perempuan di kawasan lahan gambut untuk merestorasi lahan dan mengembalikan keberadaan purun di desa mereka.

Kata Kunci: Perempuan dan lahan gambut, purun, restorasi gambut

#### Pengantar

Ekosistem di lahan gambut memiliki peran yang sangat penting bagi bumi. Food and Agriculture Organization (FAO) menyebutkan beberapa alasan vital lahan gambut bagi ekosistem dunia (FAO 2016). Pertama, gambut menyimpan 1/3 karbon tanah dunia. Kedua, gambut berfungsi mengatur aliran air, sehingga dapat mengurangi banjir, kekeringan dan intrusi air laut. Ketiga, gambut memberikan ruang lestari bagi keanekaragaman hayati, seperti keberadaan populasi ikan air tawar, orang utan, harimau, berang-berang, jenis tanaman air yang eksotik dan ekosistem lainnya yang mulai terancam

punah. Keempat, gambut menyediakan pasokan hasil hutan yang menjadi sumber makanan, nutrisi, tanaman obat, dan bahan-bahan bangunan. Kelima, gambut menyediakan ruang budaya yang menawarkan surga alam untuk refleksi spiritual dan pendidikan.

Indonesia merupakan wilayah yang memiliki lahan gambut kedua terbesar di dunia (setelah Brazil), dengan lahan gambut seluas 24,6 juta hektar tersebar di berbagai provinsi di Indonesia (KLHK 2019). Hal ini menjadikan negeri ini sangat penting bagi iklim dunia. Kebakaran hutan dan lahan gambut setiap tahun yang terjadi di Indonesia akan mempengaruhi perubahan iklim global.

Kebakaran hutan dan lahan gambut hebat di tahun 2015 memberikan dampak yang besar terhadap aspek kehidupan. Dalam angka tercatat, selama hampir 5 bulan (Juni – Oktober 2015) beberapa daerah diselimuti oleh asap dan api. Terganggunya aktivitas ekonomi yang menurunkan laju pertumbuhan, PDB tergelincir 0.2 persen. Penanganan bencana kebakaran hutan dan kabut asap menimbulkan kerugian sebesar 1, 6 juta dollar atau Rp 221 triliun (World Bank 2016).

Masyarakat yang hidup di kawasan lahan gambut adalah korban pertama yang merasakan kerugian yang paling nyata dari kerusakan ekosistem lahan gambut. Khususnya karena lahan gambut merupakan topangan hidup atau sumber mata pencaharian mereka. Sehingga pemulihan lahan gambut adalah prasyarat untuk mengembalikan perikehidupan masyarakat di lahan gambut.

Dalam rangka percepatan pemulihan kawasan dan pengembalian fungsi hidrologis gambut akibat kebakaran hutan dan lahan, Presiden Republik Indonesia membentuk Badan Restorasi Gambut (BRG) melalui Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016. BRG mempunyai tugas mengkoordinasikan dan memfasilitasi restorasi gambut di tujuh provinsi, yaitu Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Papua. Tugas restorasi ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan terpadu: *rewetting* (pembasahan kembali gambut), *revegetation* (penanaman kembali) dan *revitalization of local livelihoods* (peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal) dengan menggalang partisipasi masyarakat di wilayah 7 provinsi tersebut.

Pendekatan revitalisasi partisipatif yang dikembangkan oleh BRG menjadikan Program Desa Peduli Gambut (DPG) sebagai jantung penggerakannya. Lokasi Desa Peduli Gambut berada di dalam dan di sekitar Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) yang menjadi target restorasi gambut. Kawasan yang menjadi prioritas restorasi ditetapkan berdasarkan empat klasifikasi. Pertama, kawasan gambut terbakar pada tahun 2015. Kedua, adanya kubah gambut yang telah terdapat pembukaan antara lain kanal buatan. Ketiga, kubah gambut yang masih utuh. Keempat, kawasan yang bukan kubah tetapi ada pembukaan lahan dan pembangunan kanal buatan.

Tulisan ini menyajikan catatan pengalaman pendampingan yang dilakukan penulis dalam program Desa Peduli Gambut di bawah Kedeputusan III (Edukasi, Sosialisasi, Partisipasi, dan Kemitraan) BRG, di kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Fokus tulisan ini

adalah memotret kaitan kerusakan gambut, terutama purun, kerentanan perempuan, serta bagaimana program restorasi melakukan pemberdayaan perempuan untuk menjaga kelestarian gambut. Adapun lokasi yang dipilih adalah kabupaten Hulu Sungai Utara, salah satu dari 6 kabupaten di Kalimantan Selatan yang menjadi target restorasi gambut BRG. Sejak awal program tahun 2017 sampai saat ini tahun 2020, sebanyak 36 Desa DPG di Kalimantan Selatan telah didampingi oleh BRG, dengan 16 desa di antaranya berada di 6 Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

### **Amuntai Kota Kerajinan Purun**

Kabupaten Hulu Sungai Utara, lebih dikenal dengan nama Amuntai, adalah sebuah kota kecil dengan kondisi geografis yang unik. Keunikan wilayah ini dapat dilihat dari karakter alamnya yang 89 persen wilayahnya berada di atas air, berupa rawa lebak dan gambut. Kota ini berada di dataran rendah, pada ketinggian antara 0 hingga 6 meter di atas permukaan laut. Kota dengan luas daratan 892,70 km<sup>2</sup> (BPS 2018). Wilayah ini juga terletak di dasar mangkuk dari dua kota yang mengapitnya, yaitu Balangan dan Tabalong. Posisi dasar mangkuk membuat kota ini menjadi danau penampung limpahan air dari dua kota di atasnya. Akibatnya Amuntai secara rutin mengalami banjir akibat kerusakan lingkungan di Balangan dan Tabalong akibat tambang batubara dan penebangan hutan. Namun, posisi geografisnya juga membuat kota ini menjadi penghasil berbagai jenis air tawar yang melimpah. Air pula yang membuat kota ini dikenal sebagai destinasi wisata air Kerbau Rawa di kecamatan Danau Panggang dan Paminggir.

Berbeda dengan banyak kabupaten lain di Kalimantan Selatan, di Amuntai tidak terdapat satupun perusahaan tambang dan hanya ada sedikit perkebunan sawit. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Hulu Utara ini rendah sehingga ia termasuk dalam kategori kabupaten tertinggal di provinsi Kalimantan Selatan hingga tahun 2019 (Abdillah 2019). Namun, secara ekonomi kota ini sangat dinamis karena tradisi dagang yang sudah mendarah daging di kalangan warganya dan terkenal merambah ke berbagai kota di Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Penduduk Amuntai umumnya adalah dari etnis Banjar. Mereka bekerja sebagai nelayan sungai atau rawa, petani dan perajin anyaman serat alam. Petani serat alam umumnya adalah perempuan. Produk unggulan wilayah ini adalah berasal dari sektor perikanan dan anyaman serat alam seperti purun, eceng gondok, bamban, dan rotan merah. Kondisi alamnya memungkinkan tumbuhnya tanaman

khas gambut untuk diolah menjadi produk kerajinan. Sebagian besar perempuan di pedesaan Hulu Sungai Utara memiliki keterampilan menganyam, tidak hanya purun, tetapi juga eceng gondok, bamban, dan rotan merah. Purun merupakan salah satu serat alam yang banyak ditemui, dan anyaman purun menjadi salah satu produk unggulan dari lahan gambut di kota ini.

Kerajinan anyaman dari purun merupakan salah satu ikon kota Amuntai. Pasar kerajinan yang dilakukan setiap Kamis subuh di pusat kota telah menjadi ikon wisata kerajinan di Kalimantan Selatan. Purun diolah menjadi produk kerajinan berupa tikar, bakul, tas, topi, keranjang, vas bunga, sandal, kipas, dan perkakas rumah tangga lainnya. Produk kerajinan ini dikirim ke luar daerah, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Bali, Jawa, dan juga ke luar negeri. Keberadaan pasar kerajinan ini ditumpang dengan melimpahnya sumber daya alam tanaman purun, eceng gondok, dan bamban, yang tersebar di seluruh kecamatan. Total produksi tanaman purun mencapai 113,08 ton per tahun. Penghasil purun terbanyak adalah 4 kecamatan yang juga menjadi target restorasi gambut, yaitu Kecamatan Paminggir, Danau Panggang, Haur Gading, dan Amuntai Selatan (BPS 2018).

Berdasarkan pemetaan sosial partisipatif program Desa Peduli Gambut, kawasan gambut kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki potensi sumber daya alam yang luar biasa bagi sektor pertanian, perikanan, peternakan, dan kerajinan yang berbasis serat alam ekosistem gambut, seperti purun, eceng gondok, bamban, dan rotan. Sayangnya, hasil pemetaan yang sama sekaligus menggambarkan kondisi lahan gambut yang terancam semakin merosot dan berpotensi mengancam sumber kehidupan masyarakat yang menggantungkan hidup pada alam sekitarnya.

### **Kerusakan Gambut, Hilangnya Purun, dan Sulitnya Kehidupan Perempuan**

Purun adalah sejenis tanaman basah yang khas tumbuh di lahan gambut. Tanaman ini tumbuh sepanjang tahun. Purun merupakan salah satu indikator kelestarian gambut karena kondisi lahan gambut mempengaruhi kualitas purun yang tumbuh di atasnya. Panen purun dapat dilakukan setiap bulan, akan tetapi produksi purun berkurang ketika musim kemarau (antara bulan April-September) karena pada musim kemarau persediaan air kawasan gambut berkurang. Semakin basah kondisi lahan gambut maka semakin bagus pertumbuhan purun. Sebagian besar lahan di desa-desa gambut mengalami genangan air sekitar 7 bulan dan kering sekitar 5 bulan.

Lahan di kawasan gambut berfungsi sebagai lahan pertanian sekaligus perikanan. Di musim kering lahan rawa lebak dimanfaatkan untuk lahan pertanian atau sawah, *pahumaan*. Sedangkan di musim hujan, lahan berubah menjadi tambak ikan lokal, dan lahan tanaman *batang tanding* (talipuk/water lily) yang juga diolah menjadi produk kuliner khas gambut. Dari 6 kecamatan di Hulu Sungai Utara yang direstorasi BRG, hanya ada 4 kecamatan yang masih memiliki tanaman purun, jumlah produksinya juga cenderung menurun.

Tanaman Purun memiliki makna penting bagi perempuan di Kabupaten Hulu Sungai Utara karena ia menjadi salah satu sumber mata pencaharian perempuan secara turun temurun. Menurunnya produksi purun menimbulkan persoalan bagi perempuan. Penurunan produksi purun terjadi akibat seringnya terjadi kebakaran hutan dan lahan gambut di daerah ini. Jumlah produksi purun berangsur-angsur berkurang. Lokasi tumbuhnya tanaman purun juga semakin menjauh dari tempat tinggal mereka. Untuk mendapatkan purun kini masyarakat harus masuk ke dalam hutan rawa.

Kebakaran hebat di desa-desa gambut pada tahun 2015 dan 2019, membakar sebagian besar tanaman purun, semak belukar, perkebunan dan hutan di lahan gambut. Kebakaran dari hutan juga meluas ke perkebunan masyarakat, semak belukar dan kebun purun di sekitar lingkungan tempat tinggal mereka. Di musim kemarau angin dengan cepat meluas sehingga desa-desa yang terletak dalam satu hamparan kesatuan hidrologis gambut menjadi langganan kebakaran dan kabut asap setiap musim kemarau tiba.

“Sewaktu saya masih muda, tanaman purun berada di sekeliling rumah dan tidak jauh dari pemukiman. Dengan menaiki *jukung* (Perahu kecil yang bercadik kayu, dan hanya selebar ukuran pas badan manusia, yang didayung secara manual/tidak memakai mesin penggerak), saya mengambil purun di kebun yang jaraknya dekat dan mudah dijangkau oleh siapapun. Pengambilan purun dilakukan dengan cara dipotong, kemudian ditumpuk di *jukung*, lalu dibawa pulang. Kebun purun yang berada di atas rawa (gambut) seolah seperti tempat pertemuan dan komunikasi antar penduduk yang sedang mengambil purun atau jalan lalu lalang *jukung* ke ladang. Setelah sampai rumah, purun perlu dianginkan atau diembunkan di luar rumah, kemudian disimpan di dalam rumah untuk persediaan. Bila diperlukan, purun baru ditumbuk atau dilakukan pewarnaan terlebih dahulu, sebelum dianyam. Waktu itu, saya melakukan sendiri seluruh proses pengambilan, penyimpanan, penumbukan, pewarnaan, dan penganyaman purun. Akan tetapi, saat ini setelah

seringnya kebakaran di lingkungan desa kami, saya tidak lagi bisa mengambil purun, karena tanaman purun berada jauh dari rumah, sekitar 1 ½ - 2 jam perjalanan yang harus ditempuh dengan Cis (perahu kecil bermesin). Jauhnya tanaman purun membuat saya merasa tidak aman selama perjalanan ke hutan purun. Ditambah lagi, biaya membeli solar untuk cis yang harus dikeluarkan. (Khadijah 2019, wawancara 29 Januari)

Ibu Khadijah (66 tahun) adalah salah satu dari sedikit penganyam purun terbaik dari desa Tampakang, Kecamatan Paminggir. Kecamatan Paminggir wilayahnya sepenuhnya berada di atas air. Paparan Ibu Khadijah menjelaskan posisi perempuan dalam pengolahan purun di lingkungan lahan gambut di komunitasnya.

Berdasarkan pemetaan sosial secara partisipatif pada Februari-Juli tahun 2019 di 8 Desa Peduli Gambut di Hulu Sungai Utara, saat ini masyarakat gambut mengeluhkan berkurangnya keragaman pangan lokal. Keberadaan ikan pipih, papuyu, baung, gabus, sepat siam, dan lainnya semakin berkurang. Ragam vegetasi seperti kantong semar, taratang dan juga jenis pohon yang penting bagi masyarakat lokal seperti kayu sarapat dan kayu galam semakin sedikit jumlahnya. Selain itu fauna darat dan fauna perairan yang khas hidup di kawasan gambut seperti orang utan, bekantan, macan tutul, sadu, kucing hutan, ayam hutan, berang-berang, rusa, beruang madu, burung-burung semakin berkurang. Keberadaan orang utan antara lain dapat ditemui di kecamatan Haur Gading. Berkurangnya keanekaragaman hayati di desa gambut utamanya disebabkan oleh degradasi lingkungan akibat kebakaran hutan dan lahan, kegiatan penebangan hutan, dan perburuan liar (Sugiarto et al. 2020).

Lahan gambut yang dijadikan kebun purun juga mengalami kerentanan akibat mengeringnya lahan gambut. Meskipun populasi tumbuhan purun biasanya meningkat pasca kebakaran lahan karena tanah menjadi sangat subur. Namun sebagian lahan tersebut menjadi semak belukar yang tidak dirawat dan tidak ditanami kembali karena terlalu sering mengalami kebakaran. Akhirnya purun yang tumbuh subur hanya dapat ditemui di kawasan hutan yang jauh dari pemukiman penduduk.

Meski penduduk menanam purun, namun kualitas purun yang ditanam tidak sebaik yang tumbuh di lahan gambut yang asli. Perempuan Murung Panggang menceritakan kualitas air rawa yang menggenang di lingkungan pemukiman penduduk sudah tercampur dengan air sungai bukan *banyu sigar* (air gambut) lagi (Catatan lapangan 2019). Purun memerlukan *banyu sigar*, air berwarna coklat tua dan berasa kecut. Bila *banyu sigar* tak ada maka pertumbuhan purun pun berkurang.

Karena jumlah tanaman purun di sekitar tempat tinggal berkurang maka masyarakat harus mencari purun dengan menggunakan transportasi *jukung* dan perahu kecil bermesin. Karena akses ke tanaman purun semakin jauh, maka mencari purun tidak bisa dilakukan sewaktu-waktu saat waktu senggang di rumah. Saat ini, pengambilan purun menjadi aktifitas tersendiri yang memerlukan waktu dan biaya transportasi. Hasil pemetaan sosial partisipatif analisis gender menemukan bahwa pada umumnya perempuan tidak memiliki akses dan kontrol atas kepemilikan perahu *cis* (perahu kecil bermesin). Namun perempuan dapat mengakses dan mengontrol *kepemilikan jukung* (Catatan Pemetaan Sosial 2019).

Kerusakan ekosistem gambut memberikan pengaruh yang berbeda terhadap perempuan dan laki-laki. Karena perempuan memiliki keterbatasan akses dan kontrol atas perahu kecil bermesin, maka pengambilan purun sekarang dilakukan oleh laki-laki. Pencurian purun di ladang-ladang purun yang sunyi dan jauh dari pemukiman semakin sering terjadi. Pencurian purun membuat masyarakat enggan menanam purun.

Konsep ekofeminis penting dalam melihat keterkaitan antara kerusakan alam dengan ketimpangan gender. Françoise d'Eaubonne menjelaskan bahwa ada keterkaitan langsung antara opresi terhadap perempuan dan opresi terhadap alam (Tong 2008). Usaha membebaskan keduanya dari ketertindasan tidak dapat dilakukan bila keduanya dilihat terpisah. Penjelasan ini dirinci oleh Karen J. Warren (Tong 2008) tentang pentingnya memahami alam untuk mendapatkan pemahaman yang memadai atas opresi yang dialami perempuan dan alam. Warren merinci asumsi dasar dari ekofeminisme tersebut. Pertama, keterkaitan penting antara penindasan perempuan dan penindasan terhadap alam. Kedua, memahami alam adalah penting untuk mendapatkan pemahaman yang baik atas penindasan perempuan dan alam. Ketiga, teori dan praktik feminis harus memasukkan perspektif ekologi. Keempat, pemecahan persoalan ekologi harus menyertakan perspektif feminis, sebaliknya praktik feminis harus memasukkan perspektif ekologi (Tong 2008)

Kerusakan gambut juga dapat dilihat dalam kaitannya dengan subordinasi dan marginalisasi yang dialami perempuan. Gambut dan perempuan didudukkan pada posisi subordinat, yang dikonstruksi tidak memiliki kekuatan. Di Benak pikiran masyarakat tertanam pandangan yang memandang sifat-sifat femininitas perempuan (merawat, mengasuh, melindungi, dsb) dan juga sifat-sifat alam, yang dikonstruksi memiliki

posisi rendah, inferior, atau subordinat. Sementara tindakan maskulin atau kekerasan yang dilakukan melalui pengelolaan dan penguasaan lahan gambut dengan cara membakar, menyetryum, menebang pohon, membuat kanal-kanal, dan meracuni tanah melalui penyebaran pupuk-pupuk kimia, justru semakin sering dilakukan. Kondisi ini dijelaskan Karen J. Warren sebagai model berpikir patriarkis yang hirarkis, opresif dengan logika dominasi yang terbukti merusak perempuan dan alam.

Kehidupan perempuan yang erat dengan kerja-kerja mempertahankan hidup cenderung menaruh perhatian pada alam, seperti air, pangan, udara, dan api (Shiva & Mies 2005). Kepedulian perempuan terhadap alam dapat dilihat dalam kehidupan perempuan di desa gambut. Eratnya peran perempuan dalam ekologi dapat dilihat dari kerja-kerja tradisional seperti menjaga *air sigar* (air gambut) untuk tumbuh kembangnya tanaman purun, merawat lahan tanpa membakar, mengambil purun tanpa merusak ekosistem di sekitarnya, menyimpan dan menjemur purun dengan memperhatikan kondisi embun dan udara, dan menganyamnya untuk dijadikan produk yang ramah terhadap bumi, dengan tidak menghasilkan sampah yang merusak tanah. Kerja feminin yang dilakukan perempuan gambut ini dapat memperkuat cara-cara hidup yang lestari dan sekaligus menempatkan perempuan pada posisi setara dalam kehidupan sosial, budaya, ekonomi, dan politik.

### **Kerentanan Perempuan di Desa Gambut**

Di Kabupaten Hulu Sungai Utara, meski tidak ada perusahaan tambang yang beroperasi dan sedikit lahan perkebunan sawit. Namun, wilayah ini, termasuk desa-desa gambut mengalami kebakaran lahan, banjir dan longsor hampir setiap tahun. Bencana tersebut terjadi akibat eksploitasi sumber daya alam di daerah perbatasan, keberadaan tambang. Kerentanan ekologis menambah beban bagi perempuan dan ancaman kemiskinan bagi perempuan.

Akar pemiskinan perempuan dapat dilihat pada empat sumber. Pertama, sistem ruang privat rumah tangga. Dalam rumah tangga laki-laki memiliki akses lebih besar kepada dunia kerja dibandingkan perempuan, sementara kerja domestik perempuan dilihat sebagai kerja non produktif. Kedua, pembagian kerja secara seksual, yang menandakan perempuan memiliki peran utama (sebagian besar tersembunyi dan tidak dibayar) dalam perawatan misalnya dan posisi sekunder di pasar kerja. Kehidupan perempuan dibentuk oleh tanggung

jawab keluarga, secara tradisional perempuan diharapkan melakukan tanggung jawab tersebut. Ketidaksetaraan pekerjaan ini konsekuensinya perempuan tetap bekerja (rumah tangga) yang tidak dibayar dan bekerja di luar rumah meski laki-lakinya menganggur. Ketiga, bidang kesejahteraan, ketidaksetaraan pada perempuan di pekerjaan yang dibayar, mempengaruhi sistem penyediaan kesejahteraan bagi perempuan. Keempat, lembaga keuangan, beberapa perempuan belum bisa mengakses lembaga keuangan, semisal bank (Ruspini 2000).

Pemiskinan terhadap perempuan juga merupakan sebuah konsekuensi dari keterbatasan akses terhadap sumber daya alam. Perempuan di desa gambut menghadapi ancaman hidup akibat dari berkurangnya akses dan kerusakan sumber daya alam. Akibat pemanasan global misalnya, pola musim menjadi tidak menentu sehingga pendapatan dari hasil alam menjadi tidak menentu. Akses rumah tangga terhadap lahan (tanaman purun) pertanian, dan perikanan berkurang, sementara jumlah lapangan kerja formal terbatas jumlahnya. Secara fisik kerusakan lingkungan juga membawa risiko bagi masyarakat di desa gambut, misalnya ancaman banjir, longsor, kebakaran, kekeringan, dan juga ancaman penyakit.

Potret kerentanan perempuan yang hidup di wilayah gambut dapat dilihat baik pada aspek ekonomi, politik, sosial, maupun budaya. Secara ekonomi kebakaran hutan dan lahan gambut secara terus menerus yang mengakibatkan rusaknya ekosistem hidrologis gambut telah menghancurkan akses dan kontrol perempuan atas tanaman purun sebagai penyangga ekonomi keluarga. Perdagangan purun saat ini semakin diambil alih oleh laki-laki. Perempuan akhirnya kehilangan sumber mata pencaharian. Perempuan tidak lagi dapat menanam, dan mengambil purun. Purun sebagai bahan dasar pembuatan kerajinan anyaman semakin terkomodifikasi, dimana perempuan harus membeli bahan baku purun. Uang menjadi modal penting bagi perempuan perajin untuk membeli dan menyimpan bahan baku purun. Tengkulak atau rentenir menjadi alternatif bagi perempuan perajin untuk mendapatkan modal usaha. Kerusakan lahan gambut telah mengubah dan memperlemah posisi ekonomi perempuan di desa gambut.

Perempuan memiliki tanggung jawab terhadap ekonomi subsisten keluarga, hal ini juga berlaku pada perempuan di desa-desa gambut. Perempuan di desa-desa gambut menganyam kerajinan sepanjang hari di sela-sela tugas rumah tangga. Hasil kerajinan anyaman

digunakan untuk membeli kebutuhan pangan dan kebutuhan keluarga sehari-hari. Mereka juga melakukan kegiatan lain, seperti *mahancau* (mencari ikan dengan jala yang dipasang di bambu berbentuk segi empat), menyerok ikan di sungai yang ada di depan atau belakang rumah baik untuk kebutuhan pangan keluarga maupun untuk dijual jika hasil ikan berlebih.

Secara politik perempuan tidak memiliki kekuasaan dan tidak terwakili secara proporsional di ruang publik. Meski dimensi keterwakilan perempuan sudah dirumuskan dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, namun aspirasi dan kepentingan perempuan seringkali tidak terwakili dalam musyawarah desa. Berdasarkan kegiatan pemetaan sosial partisipatif (Februari–Juli 2019), perempuan di desa-desa gambut tidak terbiasa mengikuti musyawarah desa. Akibatnya perencanaan pembangunan di desa belum menunjukkan keberpihakan terhadap perempuan. Pembangunan lebih banyak diarahkan ke pembangunan fisik semata-mata untuk mengejar perubahan status sebagai Desa Tertinggal. Begitu pula, pada bidang pemberdayaan masyarakat desa, program yang dijalankan di desa belum mengarah pada kebutuhan pemberdayaan perempuan.

Posisi marginal perempuan secara sosial juga dapat dilihat dari akses perempuan terhadap pendidikan. Di desa-desa di kawasan gambut, pendidikan belum menjadi prioritas bagi perempuan. Data Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Hulu Sungai Utara, menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah perempuan adalah 7,09 tahun. Sehingga secara umum perempuan di Kabupaten Hulu Utara hanya mencapai pendidikan hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Rendahnya tingkat pendidikan perempuan dapat mendorong terjadinya perkawinan anak. Berdasarkan data di Kantor Pengadilan Agama di Amuntai, pada

tahun 2018 ditemukan 614 perkawinan anak perempuan di bawah usia 20 tahun. Dari angka tersebut, Kecamatan Amuntai Tengah yang masuk dalam kawasan restorasi gambut, memiliki angka tertinggi pernikahan di bawah usia 20 tahun, sebanyak 111 orang pada tahun 2018.

Dalam perspektif budaya, masyarakat Banjar memiliki tradisi *jujuran* dalam sistem perkawinan, yaitu suatu pemberian dari pihak laki-laki berupa sejumlah uang yang besaran nilai uangnya ditentukan oleh keluarga pihak perempuan. *Jujuran* merupakan bentuk penghargaan dan keseriusan pihak calon pengantin laki-laki kepada perempuan di saat lamaran pernikahan. Namun tradisi ini mengalami distorsi ketika praktek *jujuran* disalahgunakan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dengan menikahkan anak perempuan (Catatan lapangan 2019). Bagi perempuan yang hidup di desa-desa gambut kerusakan ekosistem gambut membawa dampak negatif baik secara ekonomi, sosial, maupun budaya.

### Pemberdayaan Perempuan Untuk Memulihkan Lahan Gambut

Meski telah menjadi korban akibat kerusakan ekologi, perempuan di kawasan gambut tetap memiliki potensi sebagai penjaga ekosistem gambut. Merespons kondisi rusaknya lahan gambut akibat kebakaran, BRG yang memiliki mandat untuk melakukan restorasi secara sistematis, menyeluruh dan terpadu, telah merancang program Desa Peduli Gambut (DPG). Program ini ditujukan untuk berkontribusi pada peningkatan status desa-desa gambut yang sebagian besar tertinggal dan sangat tertinggal. Berdasarkan Data Indeks Desa Membangun (IDM), ada perubahan status Desa sangat tertinggal dan tertinggal di tahun 2018 menjadi Desa berkembang di tahun 2019 dapat terbaca dalam tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. Perubahan Status Desa Berdasarkan IDM 2018-2019 Pada DPG di Kalimantan Selatan

Kalimantan Selatan		Tahun 2018/2019			
		Sangat Tertinggal	Tertinggal	Berkembang	Total
Tahun 2018	Sangat Tertinggal	2	4	-	6
	Tertinggal	-	17	6	23
	Berkembang	-	-	4	4
	Total	2	21	10	33

Sumber: Badan Restorasi Gambut 2019

Program DPG dibangun atas dasar konsep mata pencaharian penghidupan masyarakat desa yang berkelanjutan (*Sustainable rural livelihood*). Secara singkat pelaksanaan program DPG di Provinsi Kalimantan Selatan yang terkait dengan upaya pemberdayaan perempuan dilakukan dengan tiga cara. Pertama, pencegahan dan pemulihan atas kerusakan lahan gambut melalui pengelolaan lahan dan pengembangan pertanian dengan sistem pertanian tanpa bakar. Kedua, revitalisasi mata pencaharian masyarakat melalui pengembangan BUMDes dan pemberdayaan ekonomi masyarakat atau perempuan melalui perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut untuk peningkatan ekonomi desa. Ketiga, penguatan kelembagaan melalui perencanaan desa dan peraturan desa yang memiliki perspektif ramah gambut, termasuk pelibatan kelompok perempuan dalam pengambilan kebijakan di desa.

Besarnya dampak kerusakan gambut terhadap kehidupan perempuan, membuat Program DPG juga melakukan pendekatan program terhadap perempuan. Salah satu dimensi yang dikedepankan dalam program ini adalah pemberdayaan kelompok perempuan di desa gambut dan keterlibatan perempuan dalam pelestarian gambut.

Sara Hlupekile Longwe memperkenalkan kerangka konsep *Women's Empowerment Framework* (kerangka Longwe) (Williams et al. 1994). Kerangka Longwe melihat pemberdayaan perempuan sebagai cara untuk mendorong kesetaraan antara perempuan dan dengan laki-laki untuk terlibat aktif proses pembangunan dan untuk mencapai kontrol atas faktor-faktor produksi. Ada lima level pemberdayaan perempuan yang ditawarkan Longwe. Pertama, kontrol sebagai partisipasi perempuan dalam proses pembuatan keputusan yang setara. Kedua, partisipasi yang dilakukan sejak proses penilaian (*assessment*), perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Ketiga, kesadaran untuk memahami perbedaan antara jenis kelamin dan peran gender untuk mencapai keadilan gender bagi perempuan. Keempat, akses bagi perempuan terhadap faktor produksi atas landasan yang setara dengan laki-laki, misalnya akses terhadap lahan, pekerjaan, dan lainnya. Kelima, kesejahteraan bagi perempuan atas ketersediaan pasokan pangan, air, pendapatan, dan lainnya (Williams et al. 1994). Kerangka Longwe akan digunakan dalam menganalisa dari kegiatan Desa Peduli Gambut, yang akan diterapkan dalam sub bagian tulisan di bawah ini.

## Pengelolaan Pertanian Tanpa Bakar

Program DPG untuk mendorong pemberdayaan perempuan dilakukan dengan melibatkan laki-laki maupun perempuan. Salah satunya program yang dilakukan adalah mendorong pengelolaan pertanian tanpa bakar dengan memperhatikan sifat-sifat lahan gambut. Cara ini dijadikan sebagai gerakan untuk mengubah cara pandang masyarakat. Langkah awal dilakukan dengan menyediakan wadah belajar bersama di antara petani gambut mengenai pertanian ramah gambut, melalui Sekolah Lapang. Sekolah ini menanamkan nilai-nilai pertanian yang ramah lingkungan dan berkelanjutan dengan tetap mempertahankan kelestarian ekosistem gambut.

Di Kalimantan Selatan, sejak tahun 2017-2019, BRG telah meluluskan 58 kader petani gambut dari Sekolah Lapang. Sekolah Lapang menyediakan wahana belajar bagi petani lahan gambut untuk belajar dan mengembangkan teknologi baru dan juga sistem pertanian lokal turun temurun yang ramah bagi perlindungan gambut. Dari ruang belajar Sekolah Lapang, para petani memahami bagaimana memperlakukan lahan gambut secara bijak. Pemahaman ini menyadarkan petani memulai praktek bertani tanpa bakar baik di lahan sendiri atau di lahan kelompok atau desa (*mini demplot*). Praktek baik yang sudah dilakukan oleh Kader Sekolah Lapang Hulu Sungai Utara diantaranya adalah pembuatan pupuk organik baik untuk konsumsi sendiri, dan juga telah dikembangkan menjadi produk yang dijual, sebagaimana yang dilakukan oleh Kelompok Masyarakat Peduli Gambut di DPG desa Kaludan Kecil, Kecamatan Banjarang, Hulu Sungai Utara.

Gerakan pertanian tanpa bakar bertujuan untuk mengubah kebiasaan pembakaran di lahan purun, dengan maksud mempercepat pertumbuhan dengan hasil meningkatkan kualitas purun yang baik. Melalui proses ini pula, petani purun dan pemerintah didorong untuk melakukan pengembangan budidaya purun yang memperhatikan kelestarian ekosistem gambut. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan membuka kembali akses penyediaan sumber daya bagi perempuan terhadap tanaman purun. Meski demikian, perempuan, masyarakat dan pemerintah perlu memperhatikan agar proses pengembangan dan peningkatan sumberdaya purun yang tidak tergerus oleh permintaan pasar yang tak terkendali terhadap sumber alam.

### Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut

Pemberdayaan ekonomi perempuan melalui perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan. Aktivitas ini ditunjukkan untuk dapat membuka akses, memberikan persamaan kontrol dan dapat memberikan tingkat kesejahteraan bagi perempuan, dengan berpijak pada kelestarian gambut. Karena persamaan akses penguasaan alat produksi telah diberikan kepada kelompok perempuan peduli gambut yang disesuaikan dengan kebutuhan dan situasi di desa masing-masing. Pada tahun 2019, beberapa bantuan ekonomi produktif, yang disertai dengan pengembangan kapasitas (*capacity*

*building*) dalam mengelola bantuan. Program Desa Peduli Gambut ini juga berusaha mengintegrasikan programnya ke dalam program pemerintah daerah Hulu Sungai Utara, dengan menjalin kerjasama yang baik dengan Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Koperasi.

Hasil kerjasama dengan pemerintah daerah, kelompok perempuan peduli gambut mendapatkan pengembangan kapasitas dan menerima bantuan ekonomi produktif, untuk pengembangan inovasi produk anyaman purun (lihat Tabel 2 dan 3). Program ini merupakan upaya membuka persamaan akses, partisipasi, penyadaran, dan kontrol atas alat produksi untuk meningkatkan kesejahteraan terhadap ketersediaan pendapatan bagi perempuan.

**Tabel 2. Jenis dan Penerima Manfaat Bantuan Ekonomi Produktif (BEP) di Lokasi DPG Kabupaten Hulu Sungai Utara pada Tahun 2019**

No	Lokasi DPG	Jenis BEP	Waktu Pelaksanaan	Nama Kelompok Peduli Gambut	Sumber Pendanaan
1.	Palbatu, Paminggir, Hulu Sungai Utara	1. Mesin oven presto daging 2. Mesin pemasak abon 3. Mesin suwir daging 4. Mesin pengiris abon	11 Februari 2019	Kelompok Masyarakat Peduli Gambut (KMPG)	APBN
2	Kaludan Kecil, Banjar, Hulu Sungai Utara	1. Tiga Mesin Jahit untuk kerajinan purun 2. Alat pembuat Mie Labu dan pengering buah	11 Februari 2019	KMPG  Perempuan seniman pangan	APBN  UNOPS
3	Sungai Namang, Danau Panggang, Hulu Sungai Utara	Dua Mesin Jahit untuk kerajinan	Desember 2019	UPPKS Pelangi	Kemitraan/ Partnership
4.	Tambak Sari Panji, Haur Gading	1. Lima Mesin Jahit kerajinan purun dan 1 genset 2. Satu Oven pengering Sedotan Purun dan 8 buah keramba ikan	Januari 2020	Manuntung	● APBD/ Disperindagkop Hulu Sungai Utara ● Kemitraan/ Partnership
5.	Pulantani, Haur Gading, Hulu Sungai Utara	1. Dua Alat Mesin Jahit untuk Anyaman Purun, handphone untuk digital marketing 2. Seperangkat alat mesin jahit untuk purun	November 2019	KUBE Berkat Ilahi	● Kemitraan/ Partnership ● APBD/ Disperindagkop Hulu Sungai Utara
6.	Pinanghabang, Amuntai Tengah, Hulu Sungai Utara	Alat pembuat Mie Labu dan pengering buah	Februari 2019	Perempuan Seniman Pangan	UNOPS

Sumber: laporan Tahun 2019 Program Desa Peduli Gambut, Kalimantan Selatan

Upaya-upaya peningkatan kesejahteraan perempuan memperhatikan budaya dan kearifan masyarakat gambut dalam mengelola potensi desanya dalam pengembangan produk purun. Salah satu pengembangan produk purun adalah produk pakaian

dan kebutuhan perkakas hotel, yang bermotif khas masyarakat Banjar. Kebudayaan lokal dimanfaatkan sebagai basis untuk melakukan perlindungan gambut dan sekaligus memanfaatkan gambut yang langsung dapat dilakukan dan dimanfaatkan perempuan.

**Tabel 3. Kegiatan Pengembangan Kapasitas Keterampilan dan Penguatan Kelembagaan Ekonomi di Lokasi DPG Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan Tahun 2019**

No	Jenis Kegiatan Pengembangan Kapasitas yang telah dilakukan	Jumlah DPG yang terlibat	Waktu Pelaksanaan	Lokasi Kegiatan	Sumber Pendanaan
1.	Pengembangan produk Purun dan Pewarna Alam	11 DPG	Mei 2019	Kantor Desa Darussalam	UNOPS
2.	Pelatihan Kerajinan Purun	2 DPG	Agustus 2019	Kantor Desa Darussalam dan Palukahan	Swadaya
3.	Pelatihan peningkatan kerajinan purun	1 DPG	April 2019	Kantor Desa Pulantani	APBDes Pulantani
	Pelatihan Inovasi anyaman purun	1 DPG	Oktober 2019	Kantor Desa Pulantani	Kemitraan/Partnership
4.	Pelatihan pengembangan anyaman purun dan olahan pangan biji teratai	1 DPG	Oktober 2019	Kantor Desa Sungai Namang	Kemitraan/Partnership
5.	Magang perajin anyaman purun	3 DPG	Oktober	Yogyakarta	Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Koperasi, Hulu Sungai Utara
6.	Magang Pengembangan Finishing kerajinan Purun	1 DPG	Desember	Yogyakarta	Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Koperasi, Hulu Sungai Utara
7.	Pelatihan Pengembangan anyaman purun	2 DPG	Oktober dan Desember	Kantor Desa Murung Panggang dan Tambak Sari Panji	APBDes Murung Panggang dan Tambak Sari Panji

Sumber: Laporan Tahun 2019 Program Desa Peduli Gambut, Kalimantan Selatan.

Peningkatan kapasitas perempuan pengrajin dapat memberikan kepercayaan, pengalaman, dan pembelajaran yang sangat berharga bagi perempuan. Perempuan pengrajin yang sebagian besar berpendidikan rendah dan tidak pernah keluar dari desa, mendapatkan kesempatan melihat, belajar, dan berjejaring dengan pihak luar. Melalui peningkatan kapasitas bagi perempuan perajin maka inovasi terhadap produk purun dapat dilakukan. Pemerintah desa juga dapat menjadikannya sebagai produk unggulan inovasi desa.

Kelompok Eco Teratai yang digagas perempuan Desa Darussalam, Kecamatan Danau Panggang, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, beranggotakan perempuan penganyam purun, eceng gondok, dan batik Sasirangan pewarna alam. Kelompok Eco teratai Desa Darussalam dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Berkat Ilahi Desa Pulantani, dimanfaatkan sebagai wahana berkumpul, belajar bersama, dan juga sebagai wahana penguatan perempuan baik secara sosial, ekonomi, dan politik. Di dalam kegiatan baik kelompok Eco Teratai dan Berkat Ilahi, para perempuan belajar berbagi peran, dan memecahkan persoalan secara berkelompok. Di dalam pertemuan rutin kelompok, para perempuan belajar berkomunikasi dan mengartikulasikan gagasan-

gagasan mereka ke publik. Sebagian dari mereka mendapatkan kesempatan menjadi instruktur atau fasilitator bagi kelompok lain. Kepercayaan diri pada kelompok perempuan ini mulai tumbuh. Mereka mulai terlibat dalam musyawarah di desa dan menjadi bagian pengambil kebijakan di desa. Hasilnya, kepentingan perempuan pengrajin telah dimasukkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) tahun 2020. Berjejaring dengan kelompok dilakukan dengan bergabung ke dalam koperasi produsen untuk pengrajin di Hulu Sungai Utara. Proses belajar dan melalui pengalaman berkelompok menjadi pengalaman baru bagi para perempuan perajin.

Program DPG bekerjasama dengan Disperindagkop (Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi) Hulu Sungai Utara kemudian memfasilitasi pembentukan koperasi produsen tingkat kabupaten. Koperasi ini beranggotakan 6 kelompok pengrajin Desa Peduli Gambut. Koperasi dibentuk sebagai cara bersama untuk mengatasi problem ketergantungan perempuan pengrajin terhadap tengkulak dan pengepul untuk mendapatkan modal usaha. Koperasi juga memperkuat posisi para perempuan pengrajin dalam negosiasi dengan pasar.

Program Desa Peduli Gambut berusaha memfasilitasi terjadinya kegiatan ini sehingga penguatan ekonomi perempuan dapat terwujud, sebagai salah satu basis peningkatan pertumbuhan ekonomi di tingkat desa melalui skema kawasan perdesaan. Skema Kawasan perdesaan ini sudah dibentuk di Hulu Sungai Utara melalui Peraturan Bupati No 10 Tahun 2019—yang mana telah menetapkan 3 kawasan perdesaan, yakni Kawasan kerajinan, pertanian, dan perikanan.

**Penguatan Kelembagaan: Perempuan dan Perencanaan Desa Peduli Gambut**

Salah satu program DPG adalah penguatan kelembagaan pemerintah desa melalui peraturan dan perencanaan desa yang memiliki perspektif ramah gambut. Kebijakan ini diharapkan akan menjadi pijakan keberlanjutan kerja-kerja restorasi gambut di tingkat desa. penguatan kelembagaan ini diawali dengan kajian terhadap dokumen-dokumen pemerintah desa seperti RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa), RKPDes (Rencana Kerja Pembangunan Desa), dan APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa), yang dimiliki desa gambut. Berdasarkan temuan oleh Fasilitator Desa mengenai pembacaan dokumen desa menunjukkan

bahwa hampir seluruh dokumen pemerintahan DPG di Kalimantan Selatan belum memasukkan aspek-aspek perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut ke dalam perencanaan desa.

Untuk memberikan perspektif baru mengenai wawasan restorasi gambut dan perencanaan desa, Program DPG melakukan Lokakarya Desa yang dilakukan 2 kali dalam setahun. Lokakarya desa diikuti oleh perempuan, stakeholder desa, kepala Dinas Pemberdayaan Desa dan Transmigrasi, dan pihak terkait lainnya. Proses pemantapan dan kelanjutan dari hasil Lokakarya desa dilanjutkan oleh fasilitator desa melalui diskusi informal dengan kelompok-kelompok yang ada di desa dan pemerintah desa. Hasil dialog tersebut kemudian dibawa oleh masyarakat ke dalam musyawarah desa. Fasilitator desa akan memastikan proses pengintegrasian, perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut ke dalam Peraturan Desa, RKPDes dan APBDes, yang mengikutsertakan kelompok perempuan. Usulan kelompok-kelompok perempuan kemudian diajukan ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa, terutama terkait bidang pemberdayaan perempuan untuk perlindungan dan pengelolaan purun (lihat Tabel 4).

**Tabel 4. Integrasi Aspek Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut dalam Dokumen Perencanaan Desa di DPG Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, pada tahun 2019**

No	Lokasi DPG (Desa, Kecamatan)	Jenis Dokumen	Uraian Intervensi/Kegiatan yang dimasukkan dalam dokumen	Jumlah Anggaran Di Desa
1.	Desa Palukahan, Danau Panggang	RKPDes 2020 APBDes 2020	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Pelatihan kelompok (perajin purun)	Rp. 16.000.000
2.	Desa Darussalam, Danau Panggang	RKPDes 2020 APBDes 2020	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 1. Pelatihan/penyuluhan keterampilan masyarakat (perajin purun dan sasirangan pewarna alam) 2. Pengadaan tanaman purun	Rp. 20.000.000 Rp. 10.000.000
3.	Desa Sungai Namang, Danau Panggang	RKPDes 2020 APBDes 2020	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Pelatihan Teknologi Tepat Guna bagi kelompok	Rp. 10.000.000
4.	Desa Pulau Damar, Banjarang	RKPDes 2020 APBdes 2020	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Pelatihan /pemberdayaan perempuan (Pelatihan pengelolaan hasil panen lahan gambut)	Rp. 10.000.000
5.	Desa Murung Panggang, Amuntai Selatan	RKPDes 2020, APBDes 2020	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Pelatihan Kelompok Masyarakat	Rp. 7.500.000
6.	Desa Tambak Sari Panji, Haur Gading	RKPDes 2020, APBDes 2020	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Pelatihan kelompok Masyarakat (Anyaman Purun)	Rp. 12.500.000
7.	Desa Pulantani, Haur Gading	RKPDes 2020, APBDes 2020	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Pelatihan bagi Kelompok masyarakat (perajin purun)	Rp. 7.000.000
8.	Desa Tuhuran, Haur Gading	RKPDes 2020, APBDes 2020	Bidang Pembinaan Masyarakat Pembinaan Kelompok Pertanian dan Perajin	Rp. 8.000.000
Jumlah				Rp.101.000.000

Sumber: Laporan Tahun 2019 Desa Peduli Gambut Kalimantan Selatan

Usulan anggaran biaya pemberdayaan perempuan yang masuk dalam APBDes 2020 di desa DPG Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2020 sebanyak Rp 101.000.000, dari Rp. 885.550.000 anggaran perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut di APBDes 2020 di DPG Kabupaten Hulu Sungai Utara. Intervensi bidang pemberdayaan perempuan di desa DPG difokuskan pada pengembangan purun sebagai bagian dari penguatan ekonomi perempuan dan skema ekonomi kawasan perdesaan kerajinan di Hulu Sungai Utara. Selain alokasi bidang pemberdayaan, Program DPG juga menyediakan alokasi untuk budidaya tanaman purun dan untuk mengembalikan kondisi lahan gambut yang terbakar.

Berdasarkan pisau analisis kerangka pemberdayaan Longwe, pemberdayaan perempuan pada program Desa Peduli Gambut berupaya memberikan pengakuan yang positif pada isu perempuan, yaitu kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam setiap peran sosial, ekonomi, dan politik dalam aktivitas restorasi gambut. Dalam analisa Longwe kita mengkaji tingkat kesetaraan akses, kesadaran, kontrol, partisipasi, dan kesejahteraan antara perempuan dan laki-laki. Pada akhirnya, upaya restorasi gambut tidak boleh mengabaikan isu-isu perempuan karena pemecahan masalah kerusakan ekologi harus memperhatikan sudut pandang perempuan sebagai bagian dari masyarakat desa gambut.

## Penutup

Pengelolaan lahan gambut yang eksploitatif dan tidak bertanggung jawab tidak hanya mengancam perubahan iklim dan kerusakan pada ekosistem gambut, tetapi juga membawa akibat negatif terhadap perempuan di kawasan gambut. Marginalisasi perempuan harus dilihat secara komprehensif dalam pertimbangan program restorasi gambut. Sehingga penyelenggaraan restorasi gambut harus memasukkan perspektif adil gender dalam melihat resiko-resiko kerentanan terhadap perempuan akibat kerusakan lingkungan, khususnya ekosistem lahan gambut.

Berdasarkan kerangka pemberdayaan Longwe, maka kesadaran (*conscientization*) perlu dilakukan baik kepada perempuan maupun laki-laki (masyarakat). Kesadaran adil gender dalam restorasi gambut merupakan pintu gerbang untuk membuka perspektif kesetaraan antara perempuan dan laki-laki untuk menjadi pelopor atau aktor setara dalam melakukan restorasi gambut secara berkelanjutan.

Demikian pula, penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah desa dalam pengarusutamaan restorasi gambut ini juga perlu dilakukan dengan mengembangkan kebijakan desa yang berkeadilan gender. Analisis risiko kerentanan terhadap perempuan dapat menuntun arah kebijakan yang dapat mencegah resiko kerusakan lahan gambut sekaligus mendorong keadilan gender.

## Daftar Pustaka

- BPS 2019, *Kabupaten Hulu Sungai Utara Dalam Angka 2018*, BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Utara.
- Ruspini, E 2000, *Engendering Poverty Research, How to Go Beyond the Feminization of Poverty*, diakses pada 19 April 2020, <https://www.radstats.org.uk/no075/ruspini.htm>.
- Shiva, V & Mies, M 2005, *Ekofeminisme: Perspektif Gerakan Perempuan dan Lingkungan*, IRE Press, Yogyakarta.
- Sugiarto et al. 2020, *Profil Desa Peduli Gambut Desa Pulantani Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan*, Badan Restorasi Gambut, Jakarta.
- Tong, RP 2008, *Feminist Thought: Pengantar Paling Komprehensif Kepada Arus Utama Pemikiran Feminis*, Jalasutra, Yogyakarta.
- Williams, S et al. 1994, *The Oxfam Gender Training Manual*, Oxfam, London.
- World Bank 2016, *The Cost of Fire An Economic Analysis of Indonesia's 2015 Fire Crisis*, diakses 12 Maret 2020, <http://pubdocs.worldbank.org/en/643781465442350600/Indonesia-forest-fire-notes.pdf>.
- "HSU lepas dari status kabupaten tertinggal" 2019. *ANTARA*, 14 Agustus, diakses 15 Februari 2020, <https://kalsel.antaranews.com/berita/113956/hsu-lepas-dari-status-kabupaten-tertinggal>.
- "KLHK dan BRG Pulihkan 4 Juta Ha Gambut" 2019, *KLHK*, 29 Januari, diakses 16 Februari 2020, [https://ppid.menlhk.go.id/siaran\\_pers/browse/1764/KLHK.dan.BRG.Pulihkan.4Juta.Ha.Gambut](https://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/1764/KLHK.dan.BRG.Pulihkan.4Juta.Ha.Gambut)
- "Peatlands and Climate Change" 2016, *FAO*, 27 April, diakses 16 April 2020, <http://www.fao.org/resources/infographics/infographics-details/en/c/412465/>

## Catatan Akhir

1. Pemetaan sosial partisipatif dengan metode FGD diadakan di 8 Desa (Desa Sungai Namang, Darussalam, Palukahan, di kecamatan Danau Panggang, Desa Murung Panggang di Kecamatan Amuntai Selatan, desa Pulau Damar Kecamatan Banjarang, Desa Tambak Sari Panji, Pulan Tani, dan Tuhuran di Kecamatan Haur Gading) di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada bulan Februari - Juli 2019.



## **Ucapan Terima Kasih pada Mitra Bestari**

1. Dr. Andi Achdian (Universitas Nasional)
2. Dr. Widjajanti Santoso (Indonesian Institute of Sciences)
3. Dr. Irene Hadiprayitno (Leiden University)
4. Elisabet Kuswijayanti M. Si. (Indonesia)
5. Ikhaputri Widiyantini, M. Si. (Universitas Indonesia)
6. Dr. Bagus Takwin (Universitas Indonesia)



## ETIKA & PEDOMAN PUBLIKASI BERKALA ILMIAH JURNAL PEREMPUAN

<http://www.jurnalperempuan.org/jurnal-perempuan.html>

**Jurnal Perempuan** (JP) merupakan jurnal publikasi ilmiah yang terbit setiap tiga bulan dengan menggunakan sistem *peer review* (mitra bestari) untuk seleksi artikel utama, kemudian disebut sebagai Topik Empu. Jurnal Perempuan mengurai persoalan perempuan dengan telaah teoritis hasil penelitian dengan analisis mendalam dan menghasilkan pengetahuan baru. Perspektif JP mengutamakan analisis gender dan metodologi feminis dengan irisan kajian lain seperti filsafat, ilmu budaya, seni, sastra, bahasa, psikologi, antropologi, politik dan ekonomi. Isu-isu marjinal seperti perdagangan manusia, LGBT, kekerasan seksual, pernikahan dini, kerusakan ekologi, dan lain-lain merupakan ciri khas keberpihakan JP. Anda dapat berpartisipasi menulis di JP dengan pedoman penulisan sebagai berikut:

1. Artikel merupakan hasil kajian dan riset yang orisinal, autentik, asli dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang atau institusi lain. Karya belum pernah diterbitkan sebelumnya.
2. Artikel merupakan hasil penelitian, kajian, gagasan konseptual, aplikasi teori, ide tentang perempuan, LGBT, dan gender sebagai subjek kajian.
3. Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia, sejumlah 10-15 halaman (5000-7000 kata), diketik dengan tipe huruf *Calibri* ukuran 12, *Justify*, spasi 1, pada kertas ukuran kwarto dan atau layar *Word Document* dan dikumpulkan melalui alamat email pada ([redaksi@jurnalperempuan.com](mailto:redaksi@jurnalperempuan.com)).
4. Sistematika penulisan artikel disusun dengan urutan sebagai berikut: **Judul** komprehensif dan jelas dengan mengandung kata-kata kunci. Judul dan subbagian dicetak tebal dan tidak boleh lebih dari 15 kata. **Nama** ditulis tanpa gelar, institusi, dan alamat email dicantumkan di bawah judul. **Abstrak** ditulis dalam dua bahasa: Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia secara berurutan dan tidak boleh lebih dari 100-150 kata, disertai 3-5 kata kunci. **Pendahuluan** bersifat uraian tanpa subbab yang memuat: latar belakang, rumusan masalah, landasan konseptual, dan metode penelitian. **Metode Penelitian** berisi cara pengumpulan data, metode analisis data, serta waktu dan tempat jika diperlukan. **Pembahasan** disajikan dalam subbab-subbab dengan penjudulan sesuai dalam kajian teori feminisme dan/atau kajian gender seperti menjadi ciri utama JP. **Penutup** bersifat reflektif atas permasalahan yang dijadikan fokus penelitian/kajian/ temuan dan mengandung nilai perubahan. **Daftar Pustaka** yang diacu harus tertera di akhir artikel.
5. Catatan-catatan berupa referensi ditulis secara lengkap sebagai catatan tubuh (*body note*), sedangkan keterangan yang dirasa penting dan informatif yang tidak dapat disederhanakan ditulis sebagai **Catatan Akhir** (*endnote*).
6. Penulisan Daftar Pustaka adalah secara alfabetis dan mengacu pada sistem *Harvard Style*, misalnya (Arivia 2003) untuk satu pengarang, (Arivia & Candraningrum 2003) untuk dua pengarang, (Candraningrum, Dhewy & Pratiwi 2016) untuk tiga pengarang, dan (Arivia et al. 2003) untuk empat atau lebih pengarang. Contoh:  
Arivia, G 2003, *Filsafat Berperspektif Feminis*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.  
Amnesty International (AI) 2010, *Left Without a Choice: Barriers to Reproductive Health in Indonesia*, diakses pada 5 Maret 2016, [http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/AmnestyInternational\\_for\\_PSWG\\_en\\_Indonesia.pdf](http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/AmnestyInternational_for_PSWG_en_Indonesia.pdf)  
Candraningrum, D (ed.) 2014, *Body Memories: Goddesses of Nusantara, Rings of Fire and Narrative of Myth*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.  
Dhewy, A 2014, "Faces of Female Parliament Candidates in 2014 General Election", *Indonesian Feminist Journal*, vol. 2 no. 2, h. 130-147.  
"Sukinah Melawan Dunia" 2014, *KOMPAS*, 18 Desember, diakses 20 Desember 2014, <http://nasional.kompas.com/read/2014/12/18/14020061/Sukinah.Melawan.Dunia>
7. Kepastian pemuatan diberitahukan oleh Pemimpin Redaksi dan atau Sekretaris Redaksi kepada penulis. Artikel yang tidak dimuat akan dibalas via email dan tidak akan dikembalikan. Penulis yang dimuat kemudian akan mendapatkan dua eksemplar JP cetak.
8. Penulis wajib melakukan revisi artikel sesuai anjuran dan review dari Dewan Redaksi dan Mitra Bestari.
9. Hak Cipta (*Copyright*): seluruh materi baik narasi visual dan verbal (tertulis) yang diterbitkan JP merupakan milik JP. Pandangan dalam artikel merupakan perspektif masing-masing penulis. Apabila anda hendak menggunakan materi dalam JP, hubungi [redaksi@jurnalperempuan.com](mailto:redaksi@jurnalperempuan.com) untuk mendapatkan petunjuk.

YAYASAN  
**YJP**  
JURNAL  
PEREMPUAN

Jl. Karang Pola Dalam II No. 9A  
Jati Padang, Pasar Minggu,  
Jakarta Selatan 12540  
INDONESIA  
Phone/Fax: +62 21 22701689

